



Journal of Human And Education
Volume 4, No. 6, Tahun 2024, pp 26-32
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Pelatihan Dan Pendampingan Tata Kelola Desa: Meningkatkan Kapasitas Pejabat Desa Dalam Kemahiran Teknologi Dan Modernisasi Administrasi Di Kampung Kweel

**Nur Jalal^{1*}, Anis Munfarikhatin², Syahrabudin Husein Enala³, Umiyati Haris⁴,
Frederikus Antonius Mana⁵**

Universitas Musamus Merauke

Email: nurjalal242@gmail.com^{1*}, munfarikhatin_fkip@unmus.ac.id²,
syahrabudinhuseinenala@unmus.ac.id³, umiyatih12@unmus.ac.id⁴, manafrederick87@unmus.ac.id⁵

Abstrak

Pelatihan dan pendampingan tata kelola desa di Kampung Kweel bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pejabat desa dalam kemahiran teknologi dan modernisasi administrasi. Permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya kemampuan pejabat desa dalam memanfaatkan teknologi informasi, yang berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pelatihan, workshop, dan pendampingan langsung selama enam bulan. Kegiatan ini dirancang untuk membekali pejabat desa dengan keterampilan penggunaan perangkat lunak administrasi, pengelolaan data, dan komunikasi digital. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan teknis pejabat desa, dengan 80% peserta melaporkan peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam teknologi informasi. Selain itu, terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa yang didukung oleh transparansi informasi yang lebih baik. Dengan demikian, program ini berhasil menciptakan tata kelola desa yang lebih responsif dan akuntabel, serta memberikan model yang dapat diterapkan di desa-desa lain untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Kata Kunci: *Tata Kelola Desa, Teknologi Informasi, Kapasitas Pejabat Desa*

Abstract

The training and mentoring of village governance in Kampung Kweel aims to enhance the capacity of village officials in technology skills and administrative modernization. The primary issue faced is the low capability of village officials in utilizing information technology, which affects the efficiency and effectiveness of public services. The methods employed in this study include training, workshops, and direct mentoring over a six-month period. These activities are designed to equip village officials with skills in administrative software usage, data management, and digital communication. The results show a significant improvement in the technical abilities of village officials, with 80% of participants reporting enhanced understanding and skills in information technology. Additionally, there has been an increase in community participation in the village development process, supported by improved information transparency. Thus, this program successfully created a more responsive and accountable

village governance system, providing a model that can be applied in other villages to improve the quality of public services.

Keywords: *Village Governance, Information Technology, Capacity Building Of Village Officials*

PENDAHULUAN

Tata kelola desa yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan masyarakat di tingkat lokal. Namun, di Kampung Kweel, terdapat permasalahan signifikan terkait rendahnya kapasitas pejabat desa dalam memanfaatkan teknologi informasi dan modernisasi administrasi. Banyak pejabat desa yang belum memiliki keterampilan yang memadai untuk menggunakan perangkat lunak administrasi, sehingga menghambat efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Hal ini berimplikasi pada rendahnya partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan informasi desa. Dengan tantangan ini, perlu dilakukan upaya konkret untuk meningkatkan kapasitas pejabat desa agar mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memenuhi harapan masyarakat (Hidayat: 2020).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami merencanakan program pelatihan dan pendampingan yang terstruktur. Program ini akan fokus pada pengembangan keterampilan teknis pejabat desa dalam penggunaan teknologi informasi, pengelolaan data, dan komunikasi digital. Melalui pelatihan dan workshop, peserta akan diberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya teknologi dalam administrasi desa. Selain itu, pendampingan langsung akan dilakukan untuk memastikan bahwa peserta dapat menerapkan keterampilan yang telah dipelajari dalam tugas sehari-hari mereka. Dengan pendekatan ini, diharapkan pejabat desa tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga dapat mengelola informasi dengan lebih baik, meningkatkan transparansi, dan mendorong partisipasi masyarakat (Putra: 2021).

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) meningkatkan kemampuan teknis pejabat desa dalam menggunakan teknologi informasi dan perangkat lunak administrasi; (2) memperkuat sistem komunikasi digital antara pejabat desa dan masyarakat; dan (3) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa melalui transparansi informasi yang lebih baik. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, diharapkan kualitas tata kelola desa di Kampung Kweel dapat meningkat secara signifikan (Rizki: 2022).

Terdapat sejumlah teori yang mendukung pemahaman mengenai tata kelola desa dan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi publik. Teori tata kelola yang baik menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sebagai prinsip utama dalam pengelolaan pemerintahan. Selain itu, kajian tentang e-governance menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi pejabat desa memiliki dampak positif terhadap peningkatan kapasitas dan kinerja mereka. Dengan merujuk pada kajian teoritik ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan tata kelola desa melalui pemanfaatan teknologi informasi (Sari: 2023).

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi pejabat desa di Kampung Kweel, serta masyarakat luas. Peningkatan kapasitas pejabat desa dalam teknologi informasi dan administrasi modern diharapkan dapat menciptakan sistem tata kelola yang lebih baik, meningkatkan layanan publik, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi desa-desa lain dalam upaya meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik mereka (Ahmad: 2024).

METODE

Untuk menyelesaikan permasalahan terkait rendahnya kapasitas pejabat desa dalam memanfaatkan teknologi informasi dan modernisasi administrasi di Kampung Kweel, beberapa metode yang akan diterapkan dalam program pelatihan dan pendampingan ini meliputi:

a) Pendidikan Masyarakat dan Pelatihan

Kegiatan penyuluhan akan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pejabat desa mengenai pentingnya teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan. Melalui sesi diskusi interaktif, peserta akan diberikan informasi mengenai manfaat teknologi dan bagaimana hal ini dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Selain itu, informasi mengenai prinsip-prinsip tata kelola yang baik akan disampaikan untuk membangun dasar pemahaman yang kuat. Pelatihan akan menjadi inti dari program ini, di mana pejabat desa akan terlibat dalam kegiatan yang disertai dengan demonstrasi dan percontohan. Pelatihan ini akan mencakup berbagai aspek, seperti penggunaan perangkat lunak administrasi, pengelolaan data, dan teknik komunikasi digital. Dengan metode praktis ini, peserta diharapkan dapat memperoleh keterampilan tertentu yang langsung dapat diterapkan dalam pekerjaan mereka.

b) Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Ipteks)

Kegiatan ini akan difokuskan pada pengenalan dan penggunaan alat serta aplikasi yang relevan dengan administrasi desa. Kami akan mengembangkan produk berbasis teknologi yang dapat digunakan langsung oleh pejabat desa, seperti template pengelolaan data dan alat komunikasi digital. Melalui difusi ipteks, pejabat desa akan dilatih untuk mengadaptasi dan menerapkan teknologi ini dalam praktik sehari-hari mereka. Dengan menggabungkan metode-metode ini, diharapkan program pelatihan dan pendampingan ini dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas pejabat desa di Kampung Kweel, serta mendorong terciptanya tata kelola desa yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata kelola desa yang baik merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan masyarakat di tingkat lokal. Dengan adanya tata kelola yang efektif, desa dapat mengelola sumber daya yang ada dengan lebih optimal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan partisipasi aktif dari warga dalam proses pembangunan. Namun, banyak desa masih menghadapi tantangan dalam memanfaatkan teknologi informasi, yang sangat penting untuk mendukung efisiensi dan transparansi dalam administrasi.

Kampung Kweel, sebagai salah satu contoh, mengalami masalah terkait rendahnya kapasitas pejabat desa dalam menggunakan teknologi informasi. Meskipun teknologi memiliki potensi besar untuk memperbaiki cara pemerintahan bekerja, banyak pejabat desa yang belum memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengadopsinya. Hal ini mengakibatkan rendahnya efisiensi pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sebuah program yang terstruktur dan komprehensif yang fokus pada pengembangan kapasitas pejabat desa. Program ini akan meliputi berbagai kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesadaran pejabat desa mengenai pentingnya teknologi dalam tata kelola pemerintahan. Melalui pendekatan yang beragam, diharapkan pejabat desa dapat lebih siap menghadapi tantangan dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Salah satu kegiatan utama yang akan dilakukan adalah pendidikan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun dasar pemahaman yang kuat mengenai teknologi informasi dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Penyuluhan ini akan melibatkan sesi diskusi interaktif yang memungkinkan pejabat desa untuk berbagi pengalaman dan belajar dari satu sama lain.

Selain itu, difusi ilmu pengetahuan dan teknologi (Ipteks) akan menjadi bagian penting dari program ini. Dengan memperkenalkan alat dan aplikasi yang relevan, pejabat desa akan diberdayakan untuk mengimplementasikan teknologi dalam praktik sehari-hari mereka. Ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi, tetapi juga membantu menciptakan inovasi dalam administrasi desa. Pelatihan yang komprehensif juga akan menjadi inti dari program ini. Melalui pelatihan yang praktis, pejabat desa akan mendapatkan pengalaman langsung dalam menggunakan perangkat lunak administrasi dan teknik komunikasi digital. Metode ini diharapkan dapat memperkuat keterampilan mereka dan meningkatkan kepercayaan diri dalam menjalankan tugas mereka.

Melalui dua kegiatan utama yang akan dilaksanakan—pendidikan masyarakat dan pelatihan, serta difusi ipteks, program ini diharapkan dapat menciptakan perubahan yang nyata dan

berkelanjutan dalam tata kelola desa. Dengan demikian, kami siap untuk memulai pelaksanaan kegiatan ini dengan harapan yang tinggi terhadap dampaknya di masa depan.

1.1 Pendidikan Masyarakat

Kegiatan penyuluhan mengenai pentingnya teknologi informasi bagi pejabat desa di Kampung Kweel telah dilaksanakan dengan baik. Melalui sesi diskusi interaktif, peserta diberikan kesempatan untuk mendalami berbagai aspek teknologi dan aplikasinya dalam tata kelola pemerintahan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa lebih dari 80% pejabat desa yang terlibat melaporkan peningkatan pemahaman mengenai manfaat teknologi dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

Diskusi interaktif tidak hanya menciptakan suasana yang kondusif untuk bertanya, tetapi juga memfasilitasi berbagi pengalaman antar peserta. Hal ini sangat penting, karena setiap pejabat desa membawa latar belakang dan tantangan unik yang mereka hadapi. Dengan mendengarkan pengalaman satu sama lain, peserta dapat belajar cara-cara praktis untuk mengatasi masalah yang sama, serta menemukan solusi kreatif yang telah berhasil diimplementasikan oleh desa lain.

Menurut **Halim (2022)** dalam penelitiannya tentang "Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Desa", pendidikan dan penyuluhan adalah kunci untuk mengurangi kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan hasil kegiatan kami, di mana peningkatan pemahaman mengenai teknologi informasi dapat mendorong pejabat desa untuk lebih proaktif dalam mengadopsi teknologi yang tersedia.

Penelitian oleh **Sukmawati (2023)** juga menekankan pentingnya pelatihan berbasis komunitas dalam meningkatkan kapasitas pejabat desa. Dalam studinya, Sukmawati menemukan bahwa pejabat desa yang terlibat dalam pelatihan berbasis komunitas menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterampilan digital dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan interaktif yang kami terapkan dalam penyuluhan sangat efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta.



Gambar. 1 Pemaparan Pemateri Penyuluhan

Penyuluhan ini juga mencakup pemaparan mengenai prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pejabat desa dalam menerapkan nilai-nilai tersebut dalam praktik sehari-hari. Penelitian oleh **Nugroho et al. (2024)** menegaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan pengetahuan yang lebih baik, pejabat desa diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang pada gilirannya akan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Untuk menggambarkan hasil dari kegiatan ini secara lebih jelas, berikut adalah tabel yang menyajikan data hasil kegiatan penyuluhan:

Tabel. 1.1 Hasil Olahan Data (2024)

Aspek	Persentase (%)	Keterangan
Pejabat Desa yang Meningkatkan Pemahaman	80%	Menyatakan peningkatan pengetahuan tentang teknologi
Partisipasi Aktif dalam Diskusi	75%	Pejabat desa yang berpartisipasi aktif dalam diskusi
Pemahaman Prinsip Tata Kelola	70%	Merasakan peningkatan pemahaman mengenai prinsip tata kelola
Kesediaan untuk Mengimplementasikan	85%	Siap menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pekerjaan sehari-hari

Melalui tabel ini, dapat dilihat dengan jelas bahwa kegiatan pendidikan masyarakat tidak hanya berhasil meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan kesiapan pejabat desa untuk menerapkan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan. Dengan langkah awal yang kuat ini, diharapkan program-program selanjutnya dapat berjalan dengan lebih efektif, dan pejabat desa dapat membawa perubahan positif dalam administrasi desa.

Dengan hasil yang memuaskan ini, kegiatan pendidikan masyarakat diharapkan dapat dilanjutkan secara berkala untuk memastikan bahwa pejabat desa terus mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Ini merupakan investasi penting untuk masa depan tata kelola desa yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.2 Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Ipteks)

Melalui kegiatan difusi ipteks, beberapa produk berbasis teknologi telah dikembangkan, termasuk template pengelolaan data dan aplikasi komunikasi digital. Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 75% pejabat desa melaporkan telah mulai menggunakan alat yang diperkenalkan dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Penggunaan alat-alat ini menjadi langkah signifikan dalam meningkatkan efisiensi administrasi desa.



Gambar. 2 Membagikan Survey

Difusi ilmu pengetahuan dan teknologi berfungsi untuk membantu pejabat desa tidak hanya memahami teori, tetapi juga menerapkan praktik yang relevan. Menurut **Sari (2023)**, dalam penelitiannya tentang implementasi teknologi di pemerintahan desa, difusi ipteks memiliki peran penting dalam memberikan akses kepada pejabat desa terhadap alat-alat yang dapat meningkatkan kinerja mereka. Sari menekankan bahwa ketika pejabat desa diberikan alat yang tepat, mereka lebih mampu mengelola informasi secara efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, **Prasetyo (2024)** dalam penelitiannya tentang "Inovasi Digital dalam Administrasi Desa" menyatakan bahwa penggunaan teknologi yang sudah teruji, seperti template dan aplikasi, dapat mempercepat proses adaptasi teknologi dalam administrasi desa. Dengan memanfaatkan produk-produk ini, pejabat desa tidak hanya akan menghemat waktu dalam pengelolaan data, tetapi juga mengurangi kemungkinan kesalahan yang dapat terjadi jika menggunakan metode manual.

Prasetyo menyoroti bahwa adopsi teknologi yang tepat akan memperkuat fondasi administrasi yang transparan dan akuntabel, yang sangat dibutuhkan dalam konteks tata kelola desa yang baik.

Kegiatan difusi ipteks ini juga menciptakan ruang bagi pejabat desa untuk berkolaborasi dan berbagi pengalaman dalam penggunaan alat baru. Hal ini sejalan dengan pendapat **Halimah (2023)**, yang menyatakan bahwa kolaborasi antara pejabat desa dapat mendorong inovasi dan penerapan praktik terbaik dalam penggunaan teknologi. Dengan berbagi pengetahuan, pejabat desa dapat saling membantu dan mempercepat proses adaptasi terhadap perubahan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil kegiatan ini, berikut adalah tabel yang menyajikan data hasil kegiatan difusi ipteks:

Tabel. 1.2 Hasil Olahan Data (2024)

Aspek	Persentase (%)	Keterangan
Pejabat Desa yang Menggunakan Alat Baru	75%	Melaporkan telah mulai menggunakan alat yang diperkenalkan
Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Data	80%	Merasakan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan data
Kolaborasi Antarpeserta	70%	Terlibat dalam berbagi pengalaman menggunakan alat baru

Melalui tabel ini, terlihat bahwa kegiatan difusi ipteks tidak hanya berhasil dalam pengenalan alat baru, tetapi juga meningkatkan kolaborasi di antara pejabat desa. Dengan 75% pejabat desa mulai menggunakan alat baru, diharapkan bahwa adaptasi teknologi akan semakin meluas dan berkelanjutan dalam administrasi desa. Secara keseluruhan, kegiatan difusi ipteks ini menunjukkan hasil yang positif dan diharapkan dapat dilanjutkan dengan pengembangan alat-alat baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik desa. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa tata kelola desa dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat, sehingga pelayanan publik menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat **Top of Form**

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pejabat desa di Kampung Kweel melalui pemanfaatan teknologi informasi dan modernisasi administrasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan berhasil meningkatkan pemahaman pejabat desa tentang pentingnya teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan. Lebih dari 80% peserta melaporkan peningkatan pengetahuan yang signifikan tentang manfaat teknologi, yang diharapkan dapat mendukung efisiensi pelayanan publik.

Selain itu, melalui difusi ilmu pengetahuan dan teknologi (Ipteks), berbagai produk berbasis teknologi telah diperkenalkan, termasuk template pengelolaan data dan aplikasi komunikasi digital. Hasil survei menunjukkan bahwa 75% pejabat desa telah mulai menggunakan alat-alat tersebut dalam praktik sehari-hari mereka, mencerminkan adopsi yang positif terhadap teknologi baru. Penggunaan alat yang relevan tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan data, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara pejabat desa. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kolaborasi dapat mendorong inovasi dan praktik terbaik dalam penggunaan teknologi.

Peningkatan pemahaman mengenai prinsip-prinsip tata kelola yang baik, disertai penerapan teknologi yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi desa. Ini merupakan langkah penting untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam proses pembangunan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang tata kelola yang baik, pejabat desa akan lebih siap untuk memenuhi harapan masyarakat.

Akhirnya, penting untuk melanjutkan program pelatihan dan pendampingan yang terstruktur agar pejabat desa terus mendapatkan pembaruan mengenai teknologi dan praktik administrasi. Pengembangan lebih lanjut dari alat-alat teknologi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik desa juga perlu dipertimbangkan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kualitas tata kelola desa di Kampung

Kweel dapat terus meningkat, dan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi desa-desa lain dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Rektor Universitas Musamus dan LPPM Universitas Musamus yang telah memberikan kepercayaan kepada TIM kami untuk melaksanakan Pengabdian DIPA Unmus Tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, A. (2024). Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Tata Kelola Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 15-25.

Anwar, F., & Susanto, B. (2023). Digitalisasi administrasi desa: Menyongsong era baru pemerintahan. *Jurnal E-Governance*, 6(2), 15-30.

Halim, M. (2022). Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 75-90.

Halimah, L. (2023). Kolaborasi dalam administrasi desa: Membangun inovasi melalui kerja sama. *Jurnal Manajemen Desa*, 5(4), 25-40.

Hidayat, R. (2020). Tata Kelola Desa dan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 5(2), 45-60.

Kurniawan, J. (2022). Strategi peningkatan kapasitas pejabat desa melalui pendidikan dan pelatihan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 8(1), 100-115.

Nugroho, S., & Prabowo, H. (2024). Penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam administrasi desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 45-60.

Prasetyo, A. (2024). Inovasi digital dalam administrasi desa: Tantangan dan peluang. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 9(3), 112-130.

Putra, S. (2021). Pengembangan Keterampilan Pejabat Desa dalam Era Digital. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 7(3), 30-40.

Rahman, I. (2022). Teknologi informasi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa. *Jurnal Sosial dan Politik*, 14(3), 201-215.

Rizki, F. (2022). E-Governance dan Efisiensi Pelayanan Publik di Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(4), 22-35.

Sari, N. (2023). Pendidikan Berkelanjutan untuk Pejabat Desa. *Jurnal Studi Kebijakan*, 12(1), 50-65.

Sari, R. (2023). Implementasi teknologi di pemerintahan desa: Studi kasus di beberapa desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 17(1), 55-70.

Sukmawati, D. (2023). Pelatihan berbasis komunitas untuk peningkatan kapasitas pejabat desa. *Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat*, 10(2), 88-104.